V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB)

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk Membantu Gubernur dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Entitas berkedudukan di Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) mempunyai tugas dan fungsi Membantu Gubernur dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) berkomitmen dengan visi “Membantu Gubernur dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten Tahun 2017-2022.”

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kepada Kementerian negara/Lembaga;
- Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus;
- Meningkatnya perlindungan khusus anakkepentingan;
- Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

Pendahuluan

A.2. Pendahuluan

Paket Undang-undang regulasi pengelolaan keuangan beserta turunannya membawa atmosfir baru terhadap tata kelola keuangan pemerintah dengan berbagai penyempurnaan-penyempurnaannya, ini semua untuk memenuhi keinginan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah yang dapat diterima secara umum. Adanya pergeseran-pergeseran terhadap penerapan fungsi-fungsi pengelolaan serta penatausahaan keuangan daerah semula bersifat sentralistik menjadi desentralisasi, yang artinya bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas pelaporan berkewajiban untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, efisiensi dan transparansi dengan melaporkan secara periodik dan berjenjang.

Selain itu laporan keuangan merupakan potret realisasi atas anggaran pendapatan dan belanja pada setiap SKPD pada tahun berkenaan, tercermin dalam tabel perangkaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Namun demikian untuk memudahkan pengungkapan secara naratif atas pergerakan angka tersebut diatas maka dapat dipahami melalui Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Maksud dan Tujuan

A.2.1. Maksud dan Tujuan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance).

Sedangkan maksud dan tujuan dibuatnya Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

a). Menyajikan informasi tentang kebijakan keuangan dan pencapaian target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

b). Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

c). Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

d). Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

e). Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

f). Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Dasar Hukum

A.2.2. Dasar Hukum

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance).

Sedangkan maksud dan tujuan dibuatnya Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

1). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;

2). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

5). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

7). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

10). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

12). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13). Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E);

14). Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9);

15). Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);

16). Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 4);

17). Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 48) dan Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 68);

18). Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 3);

19). Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 51);

20). Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 23);

21). Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 24);

22). Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 48);

23). Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 39);

24). Keputusan Kepala BPKAD Nomor DPPA/B.1/2.08.2.12.2.14.02.00/001/2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

SIMRAL terdiri dari Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan dan Aplikasi Teknologi Informasi Silus Barang Daerah (ATISISBADA). SIMRAL dan ATISISBADA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Perencanaan Anggaran, Penatausahaan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan ATISISBADA adalah sistem yang menghasilkan informasi perencanaan, penerimaan dan distribusi, penatausahaan, pemeliharaan aset tetap, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik daerah serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) adalah sebagai berikut:

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang merupakan entitas pelaporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB). Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- Akuntansi Belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai signifikan.

- Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kas tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersembahkan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pituang Jangka Panjang

Pituang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimilki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
   Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

   Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga (Account Payable), Utang Bunga (Accrued Interest), Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities), Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan dan yang diperjualbelikan, Perubahan Valuta Asing.

b. Kewajiban Jangka Panjang
   Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor: 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi pada penjelasan tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo yang ditetapkan	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Peraturan Gubernur Nomor: 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dalam penjelasan tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor: 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi pada Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Daerah. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Rp0

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 December 2021 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 00,00% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan dinas tidak mengelola pendapatan.

Realisasi Belanja Rp25.583.343.908

BELANJA OPERASI

Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 adalah sebesar Rp25.560.243.876 atau 91,92 persen dari anggaran senilai Rp27.805.903.775. Rincian Anggaran dan realisasi belanja per 31 December 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 December 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	15.849.000.000	14.986.980.587	94,56
Belanja Barang	11.644.303.275	10.451.003.289	89,75
Belanja Modal	312.600.500	122.260.000	39,11
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	***27.805.903.775***	***25.583.343.908***	***92,01***
Pengembalian Belanja		***23.100.032***	***0,00***
Belanja Netto	***27.805.903.775***	***25.560.243.876***	***91,92***

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

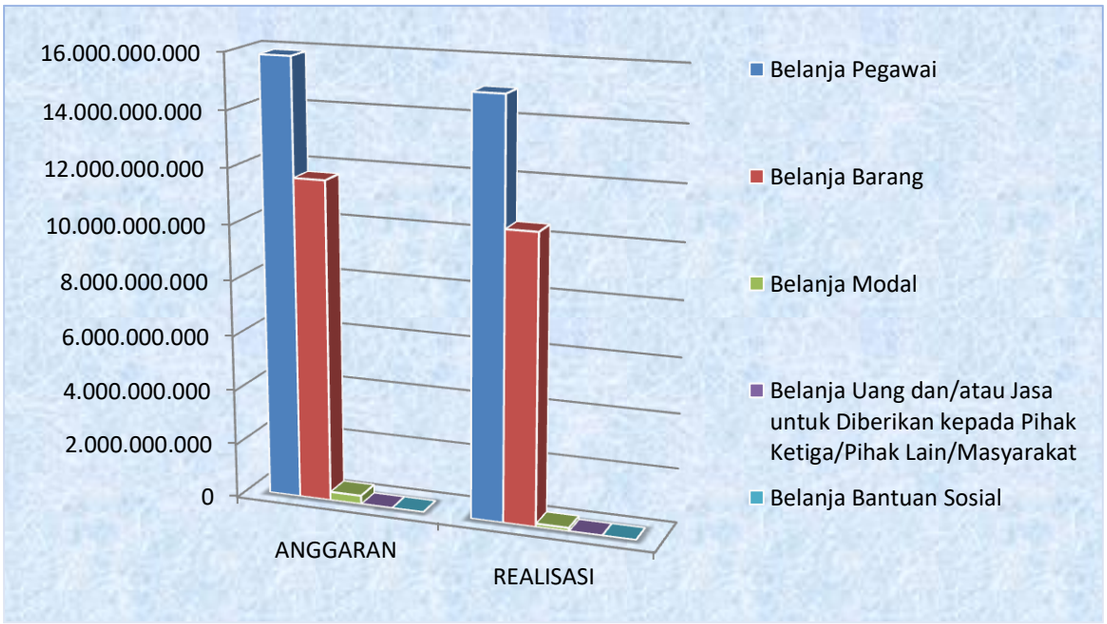

Realisasi Belanja per 31 December 2021 sebesar 92,01 persen jika dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Komposisi Realisasi Belanja per 31 December 2021 diperbandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2020, dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

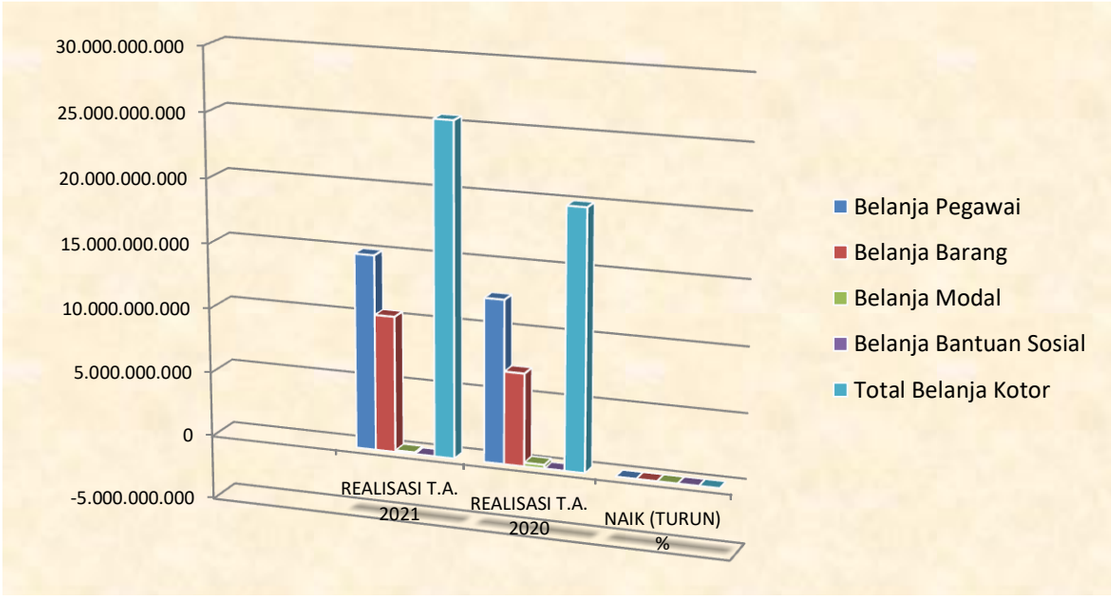

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020, Realisasi Belanja per 31 December 2021 mengalami kenaikan sebesar 28,13 dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya regulasi dan peraturan yang melonggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa serta membatasi Belanja Modal hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 December 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	14.986.980.587	12.546.552.467	19,45
Belanja Barang	10.451.003.289	7.114.617.967	46,89
Belanja Modal	122.260.000	287.100.000	-57,42
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	**25.560.243.876**	**19.948.270.434**	**28,13**

Belanja Pegawai Rp14.986.980.587

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) pada Tahun Anggaran 2021 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 December 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14.986.980.587 dan Rp12.546.552.467 Berdasarkan Tabel, realisasi belanja 31 December 2021 mengalami kenaikan sebesar 19,45 persen dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya bencana luar biasa yaitu pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap kinerja dimana sesuai regulasi yang ada maka dilakukan pembagian tugas pegawai ada yang Piket dan WFH (Work From Home) diatur 50% kerja masuk kantor dan 50% kerja dirumah.
2. Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS berdasarkan Beban Kerja dengan berlakunya regulasi hal tersebut point satu maka pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja dibayar hanya 100%.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.174.601.168	3.236.445.600	-1,91
Belanja Tunjangan Keluarga	274.260.120	274.859.932	-0,22
Belanja Tunjangan Jabatan	240.260.000	241.690.000	-0,59
Belanja Tunjangan Umum	105.015.000	110.880.000	-5,29
Belanja Tunjangan Beras	168.376.500	151.502.640	11,14
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.818.527	6.429.944	21,60
Belanja Pembulatan Gaji	42.199	45.445	-7,14
Belanja Iuran BPJS Kesehatan ASN	334.694.081	313.582.123	6,73
Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Kecelakaan Kerja) ASN	6.510.194	27.054.173	-75,94
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	19.530.823	0	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0	0	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	10.304.786.975	8.154.662.610	26,37
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	7.700.000	14.000.000	-45,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	343.385.000	15.400.000	2129,77
Belanja Honorarium	0	0	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0	0	0,00
Belanja Vakasi	0	0	0,00
Belanja Uang Lembur	0	0	0,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 5124	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***14.986.980.619***	***12.546.552.467***	***19,45***
Pengembalian Belanja	*32*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***14.986.980.587***	***12.546.552.467***	***19,45***

Dapat kita lihat pada tabel dibawah ini merupakan Realisasi Belanja Pegawai per 31 December 2021 mengalami kenaikan sebesar 19,45 persen .

Realisasi Belanja Pegawai per 31 December 2021

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2021	REALISASI T.A. 2021	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.289.920.000	3.174.601.168	96,49
Belanja Tunjangan Keluarga	331.100.000	274.260.120	82,83
Belanja Tunjangan Jabatan	247.100.000	240.260.000	97,23
Belanja Tunjangan Umum	118.370.000	105.015.000	88,72
Belanja Tunjangan Beras	203.789.880	168.376.500	82,62
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.000.000	7.818.527	37,23
Belanja Pembulatan Gaji	103.322	42.199	40,84
Belanja Iuran BPJS Kesehatan ASN	385.920.000	334.694.081	86,73
Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Kecelakaan Kerja) ASN	14.762.210	6.510.194	44,10
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.000.000	19.530.823	81,38
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	18.404.588	0	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	10.783.650.000	10.304.786.975	95,56
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	9.600.000	7.700.000	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	401.280.000	343.385.000	0,00
Belanja Honorarium	0	0	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0	0	0,00
Belanja Vakasi	0	0	0,00
Belanja Uang Lembur	0	0	0,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 5124	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***15.849.000.000***	***14.986.980.619***	***94,56***
Pengembalian Belanja	***0***	***32***	***0,00***
Jumlah Belanja Netto	***15.849.000.000***	***14.986.980.587***	***94,56***

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) pada Tahun Anggaran 2021 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja yang dianggarkan untuk Belanja Pegawai adalah sebesar Rp15.849.000.000 terrealisasi sebesar Rp14.986.980.587 atau sebesar 94,56 persen sehingga belanja pegawai tidak terrealisasi 100 persen, hal ini disebabkan pada saat perubahan anggaran adanya penambahan anggaran namun tidak dapat di realisasikan terbentur dengan regulasi yang ada, pada Tahun Anggaran 2021 adanya pengembalian belanja atas Belanja Pembulatan Gaji Pegawai sebesar Rp32 .

Belanja Barang Rp9.167.684.089

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun Anggaran 31 December 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.167.684.089 dan Rp6.650.252.429.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran Per 31 December 2021 mengalami kenaikan 37,85 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya kenaikan belanja barang operasional yang cukup signifikan di samping naiknya biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas sepanjang Tahun Anggaran 2021 rincian dapat dilihat dibawah ini.

Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	3.655.314.200	948.427.000	285,41
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0,00
Belanja Jasa	5.083.619.320	5.389.577.162	-5,68
Belanja Pemeliharaan	428.750.569	312.248.267	37,31
Belanja Perjalanan Dinas	1.166.319.200	464.365.538	151,16
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	117.000.000	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***9.190.784.089***	***6.650.252.429***	***38,20***
Pengembalian Belanja	*23.100.000*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***9.167.684.089***	***6.650.252.429***	***37,85***

Realisasi Belanja Langsung Per Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun Anggaran Per 31 December 2021 mengalami kenaikan sebesar 37,85 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya kenaikan belanja barang operasional yang cukup signifikan dikarenakan adanya perubahan regulasi-regulasi di samping naiknya biaya pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 terjadi pengembalian belanja atas kelebihan pembayaran sebesar Rp23.100.000.

LAPORAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN T.A. 2021	REALISASI T.A. 2021	Naik (Turun) %
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**18.656.236.000**	**17.700.489.051**	**94,88**
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	249.041.000	222.095.500	89,18
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.924.000.000	15.061.980.587	94,59
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.339.000	30.844.000	98,42
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	986.700.750	980.734.075	99,40
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.414.000	28.558.000	97,09
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.006.304.000	947.526.320	94,16
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.437.250	428.750.569	99,84
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	**2.109.555.000**	**1.941.229.000**	**92,02**
8	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	156.803.000	139.355.000	88,87
9	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1.284.752.000	1.171.814.000	91,21
10	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	668.000.000	630.060.000	94,32
	Program Perlindungan Perempuan	**955.707.000**	**905.953.000**	**94,79**
11	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	514.032.500	488.132.500	94,96
12	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	242.928.500	230.074.500	94,71
13	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layananan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	198.746.000	187.746.000	94,47
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	**2.410.310.000**	**2.119.914.600**	**87,95**
14	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	821.352.000	780.647.500	95,04
15	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1.588.958.000	1.339.267.100	84,29
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	**576.984.000**	**518.828.000**	**89,92**
16	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	576.984.000	518.828.000	89,92
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**329.049.500**	**218.675.000**	**66,46**
17	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	227.799.500	126.875.000	55,70
18	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	101.250.000	91.800.000	90,67
	Program Perlindungan Khusus Anak	**477.461.500**	**434.240.300**	**90,95**
19	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	73.833.000	67.034.000	90,79
20	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	203.856.500	189.296.300	92,86
21	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	199.772.000	177.910.000	89,06
	Program Pendaftaran Penduduk	**497.886.775**	**281.113.500**	**56,46**
22	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	87.124.000	67.583.000	77,57
23	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	356.596.775	178.174.500	49,97
24	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	54.166.000	35.356.000	65,27
	Program Pencatatan Sipil	**438.984.000**	**238.145.500**	**54,25**
25	Pelayanan Pencatatan Sipil	63.984.000	40.678.000	63,58

26	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	237.082.000	109.096.000	46,02
27	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	137.918.000	88.371.500	64,08
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**491.577.000**	**453.110.800**	**92,17**
28	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	404.784.000	381.583.800	94,27
29	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	86.793.000	71.527.000	82,41
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	**207.345.000**	**196.670.125**	**94,85**
30	Penyediaan Profil Kependudukan	207.345.000	196.670.125	94,85
	Program Pengendalian Penduduk	**306.200.000**	**289.736.000**	**94,62**
31	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	124.109.000	116.789.000	94,10
32	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	182.091.000	172.947.000	94,98
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**139.008.000**	**124.753.000**	**89,75**
33	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	74.373.000	66.868.000	89,91
34	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	64.635.000	57.885.000	89,56
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**209.600.000**	**137.386.000**	**65,55**
35	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	88.000.000	49.594.000	56,36
36	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	121.600.000	87.792.000	72,20
	Jumlah	**27.805.903.775**	**25.560.243.876**	**91,92**

Kondisi realisasi anggaran maupun kegiatan secara keseluruhan terdampak oleh kondisi bencana luar biasa yaitu pandemi Covid-19 sehingga keseluruhan kegiatan menyesuaikan dengan regulasi yang dibuat baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor : 443/Kep.114-Huk/2020 Tentang Penetapan KLB Covid-19 dan SE Sekda Banten Tentang Pembatasan Kegiatan tersebut telah berubah disesuaikan dengan kondisi dan situasi dapat dilihat dibawah ini, Program Kegiatan yang terdampak sehingga realisasi keuangan dibawah 80% dapat dijelaskan dibawah ini.

No.	Uraian	Keterangan dan Alasannya
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Karena perjalanan dinas dalam rangka FAN ke luar daerah yang diselenggarakan pusat secara virtual atau online (zoom meeting), hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19
	Program Pendaftaran Penduduk	
3	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Sisa belanja : Belanja/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 462.000; Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia sebesar Rp 15.540.000; Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebsar Rp 3.539.000. Dengan adanya regulasi tentang pandemi sehingga disesuaikan dengan SSH dan perubahan mekanisme pertemuan yang semula tatap muka langsung menjadi Zoom Meeting dikarenakan Pandemi Covid-19.

4	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Sisa belanja : Rp. 67.041.500, terdiri atas : Belanja/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp.2.470.000; Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp.4,220.000; Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia sebesar Rp. 14.250.000; Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp 2.000.000; Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 29.044.500; Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 15.057.000. Alasan Anggaran Tidak Digunakan : Rp. 111.380.775, disebabkan karena : ***1. Berdasarkan*** surat Kepala BPKAD Provinsi Banten nomor 900/1462-BPKAD.02/2021 TANGGAL 22 Oktober 2021perihal Penjelasan DAK Nonfisik Pelayanan Adminduk TA. 2021, bahwa setelah dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terhadap Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.07/2020, serta berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Adminduk Provinsi Banten adalah sebesar Rp. 1.119.382.000 atau tidak terdapat anggaran tambahan pada APBD Perubahan TA. 2021. ***2. Berdasarkan*** angka 1 tersebut, maka penambahan pagu pada APBD Perubahan TA. 2021 sebesar Rp. 236.380.775 yang didistribusikan kepada 4 (empat) program yang meliputi Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependukan serta Program Profil Kependudukan tidak dapat direalisasikan .
5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Sisa belanja : Rp. 18.810.000, terdiri atas : Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 1,680.000; Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia sebesar Rp. 5.850.000; Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.480.000; Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 4.800.000. Dikarenakan disesuaikan dengan SSH dan perubahan mekanisme pertemuan yang semula tatap muka langsung menjadi Zoom Meeting dikarenakan Pandemi Covid-19.
	Program Pencatatan Sipil	
6	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kegiatan dilakukan Secara Zoometing Tidak ada peserta Rapat Kegiatan
7	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tentang Fasilitasi Layanan Penerbitan Akta Kelahiran di Wilayah Baduy dan Cisungsang tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Surat dari BPKAD No : 900/1462-BPKAD.02/2021 Prihal: Penjelasan DAK Non Fisik TA.2021
8	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil untuk Cetak Buku Himpunan Peraturan Perundangan Pencatatan Sipil tidak dilaksanakan berdasarkan Surat dari BPKAD No : 900/1462-BPKAD.02/2021 Prihal: Penjelasan DAK Non Fisik TA.2021
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
9	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kendala Kegiatan pada tahun 2021adalah sebagai berikut : 1). Ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara daring, sehingga uang transport , makan dan minum tidak dapat di serap sehingga menjadi silpa. 2). Untuk Honor nara Sumber tidak diserap secara utuh, karena ada beberapa Narsumnya adalah ASN di DP3AKKB sehingga hanya bisa diserap 50% saja. 3). Karena masih dalam masa pandemi Covid 19 (PPKM), sehingga Koordinasi/Perjadin ke 8 Kabupaten/Kota tidak diserap. Namun secara keseluruhan kendala ini tidak begitu mengganggu jalannya kegaiatan. Pada umumnya kendala yang ada pada kegiatan dapat diselesaikan, disesuaikan dengan keadaan masa pandemi covid 19. Kami tidak memaksakan kegiatan secara tatap muka jika memang ada himbauan untuk tidak mengadakan kegiatan secara tatap muka dan hanya Daring.
10	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kendala Kegiatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut : 1). Ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara daring, sehingga uang transport , makan dan minum tidak dapat di serap sehingga menjadi silpa. 2). Untuk Honor nara Sumber tidak diserap secara utuh, karena ada beberapa Narsumnya adalah ASN di DP3AKKB sehingga hanya bisa diserap 50% saja. 3). Karena masih dalam masa pandemi Covid 19 (PPKM), sehingga Koordinasi/Perjadin ke 8 Kabupaten/Kota tidak diserap. Namun secara keseluruhan kendala ini tidak begitu mengganggu jalannya kegaiatan. Pada umumnya kendala yang ada pada kegiatan dapat diselesaikan, disesuaikan dengan keadaan masa pandemi covid 19. Kami tidak memaksakan kegiatan secara tatap muka jika memang ada himbauan untuk tidak mengadakan kegiatan secara tatap muka.

Belanja Hibah Rp0

B.4 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Hibah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp117.000.000 dan Rp0.

Realisasi Belanja Hibah TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Hibah TA 2020. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah penerima hibah dalam rangka pemberdayaan untuk mendukung rencana kerja strategis.

Perbandingan Belanja Hibah TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Hibah	117.000.000	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***117.000.000***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***117.000.000***	***0***	***0,00***

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 mengalami penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah penerima bantuan sosial dalam rangka pemberdayaan sosial untuk mendukung rencana kerja strategis.

Perbandingan Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***0***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***0***	***0***	***0,00***

BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah Rp0

B.6 *Belanja Modal Tanah*

Realisasi Belanja Modal Tanah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal 31 December 2021 mengalami Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2020. Hal ini disebabkan penambahan tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***0***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***0***	***0***	***0,00***

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp73.260.000

B.7 *Belanja Modal Peralatan dan Mesin*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp73.260.000 dan Rp283.500.000 atau sebesar -74,16 persen.

Sesuai rencana anggaran kegiatan, kecuali belanja modal Peralatan dan mesin, pengadaan personal komputer, dan pengadaan alat studio di karenakan pengadaan melalui e purchasing. Sampai dengan bulan november 2020 produk tidak tayang maka pembelian dibatalkan. Mengindari Deviasi

Realisasi Belanja Modal per 31 December 2021 mengalami Penurunan sebesar -74,16 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2020. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti regulasi yang membatasi dalam belanja modal karena kondisi pandemi luar biasa Covid-19 yang merupakan bencana nasional dan internasional sehingga segi prioritas di anggarkan ke penanganan bencana pandemi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 December 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	0	261.000.000	-100,00
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	0	0	0,00
Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	73.260.000	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	22.500.000	-100,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Server Komputer	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Kerja Pejabat	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video Fisual	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telepon	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Sandi	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***73.260.000***	***283.500.000***	***-74,16***
Pengembalian Belanja	0	0	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***73.260.000***	***283.500.000***	***-74,16***

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.8 *Belanja Modal Gedung dan Bangunan*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2021 mengalami Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2020. Hal ini disebabkan oleh pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	Naik (Turun) %
	0	0	0,00
	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***0***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***0***	***0***	***0,00***

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2021 mengalami Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2020. Hal ini disebabkan oleh pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***0***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***0***	***0***	***0,00***

Belanja Modal Lainnya Rp0

B.10 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp49.000.000 dan Rp3.600.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2021 mengalami Kenaikan sebesar 1261,11 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2020. Hal ini disebabkan oleh pengadaan Buku bahan untuk perpustakaan untuk peningkatan wawasan dan minat baca..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Pengadaan Software	0	0	0,00
Software	49.000.000	3.600.000	1261,11
Program Komputer	-	-	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***49.000.000***	***3.600.000***	***1261,11***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***49.000.000***	***3.600.000***	***1261,11***

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
ASET LANCAR

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 Desember 2021 sebesar Rp0 sudah dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai STS Nomor 0022/XII-STS-DP3AKKB/2021 tertanggal 17 Desember 2021 sehingga pada neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:"

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Bend Peng DP3AKKB Prov Banten 0801024793	Rp -	Rp -
2	Bend Peng DP3AKKB Prov BJB 0100000120201	Rp -	Rp -
3	Uang Tunai	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp -	Rp -

Kas di Bendahara Penerima Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 December 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Daerah Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Jenis	Tahun 2021	Tahun 2020
1	-	Rp -	Rp -
2	Uang Tunai	Rp -	Rp -
Jumlah		**Rp -**	**Rp -**

Kas di BLUD Rp0

C.3 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per tanggal 31 December 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas di BLUD merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian sumber Kas di BLUD pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di BLUD

Jenis	Tahun 2021	Tahun 2020
	-	-
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Kas Lainnya Rp0

C.4 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per tanggal 31 December 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Rincian Kas Lainnya disajikan sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	-	-
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Setara Kas Rp11.754.900

C.5 Setara Kas

Saldo Setara Kas per tanggal 31 December 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. pada tanggal pelaporan. Rincian Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar (TP/TGR)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1		-	-
2		-	-
Jumlah		**-**	**-**

Bagian Lancar TPA Rp11.754.900

C.6 Investasi Jangka Pendek

Saldo Investasi Jangka Pendek per tanggal 31 December 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Investasi Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Pendek

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1		-	-
2		-	-
Jumlah		**-**	**-**

Piutang Pendapatan Rp0

C.7 Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan per 31 December 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Piutang Pendapatan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Piutang Pendapatan

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
Total				**-**

Piutang Lainnya Rp0

C.8 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 December 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Piutang Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Piutang Lainnya

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
Total				**-**

Penyisihan Piutang Rp0

C.9 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 December 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Penyisihan Piutang pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
Total				**-**

Beban Dibayar di Muka Rp67.182.320,44

C.10 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 December 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp67.182.320,44 dan Rp0. Beban Dibayar di Muka Sewa Bangunan Gedung Kantor - Gedung Workshop Hasil Industri Rumahan Perempuan merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka

Penyedia Barang dan Jasa	Jangka Waktu			Cut Off	Nilai Kontrak	Sisa Waktu (Hari)	Nilai Belanja Dibayar di Muka
	Hari	Tgl Mulai	Tgl Selesai				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/2)x6
Ir. Darismanto	362	01/11/2021	31/10/2022	31/12/2021	80.000.000,00	304	67.182.320,44
Jumlah							**67.182.320,44**

Persediaan Rp11.754.900

C.11 Persediaan

Nilai Persediaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp8.837.200 dan Rp11.754.900 atau sebesar -24,82 persen. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp8.837.200 dan Rp11.754.900 atau sebesar -24,82 persen. tidak ada mutasi masuk reklasifikasi dari Akun sebesar Rp0 ."

Rincian Perbandingan Persediaan

Persediaan	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun) %
Alat Tulis Kantor	5.436.200	4.979.900	9,16
Alat Listrik dan Elektronik	440.000	-	-
Perangko, Materai dan Benda Pos	1.300.000	-	-
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	-	-
Suku Cadang Peraltan Komputer/Printer/Jaringan	-	-	-
Suku Cadang Alat Studio	-	-	-
Vandel, Plakat, Piala, Medali dan Cinderamata	-	-	-
Perlengkapan Peserta/Panitia	-	-	-
Peralatan Dapur	-	-	-
Persediaan Suku Cadang Peralatan/Perlengkapan Kantor	-	-	-
Bahan Percontohan/Peraga/Praktek	-	-	-
Kertas dan Cover	1.661.000	-	-
Barang Cetak	-	6.775.000	(100,00)
Pakaian PDH	-	-	-
Pakaian Dinas Batik	-	-	-
Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-
Pakaian Batik Tradisional	-	-	-
Pakaian Bercorak Kesenian	-	-	-
Hadiah Prestasi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Desa	-	-	-
Bantuan Sosial Berupa Barang Kepada Masyarakat	-	-	-
Barang Non Kapitalisasi Konstruksi/Bangunan	-	-	-
Jumlah	8.837.200	11.754.900	(24,82)

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Rp0

C.12 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 December 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. .

Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 December 2021 adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya Rp0

C.13 Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya

Saldo Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya per 31 December 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya per 31 December 2021 adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Investasi Dalam Obligasi Rp0

C.14 Investasi Dalam Obligasi

Saldo Investasi Dalam Obligasi per 31 December 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Rincian Saldo Investasi Dalam Obligasi adalah sebagai berikut:

Investasi Dalam Obligasi

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Investasi dalam Proyek Pembangunan Rp,00

C.15 Investasi dalam Proyek Pembangunan

Saldo Investasi dalam Proyek Pembangunan per 31 December 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Investasi dalam Proyek Pembangunan adalah sebagai berikut:

Investasi Dalam Obligasi

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Dana Bergulir Rp0

C.16 Dana Bergulir

Saldo Dana Bergulir per 31 December 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

Dana Bergulir

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Deposito Jangka Panjang Rp0

C.17 Deposito Jangka Panjang

Saldo Deposito Jangka Panjang per 31 December 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Deposito Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Deposito Jangka Panjang

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Investasi Non Permanen Lainnya Rp0

C.18 Investasi Non Permanen Lainnya

Saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 December 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Investasi Non Permanen Lainnya adalah sebagai berikut:

Investasi Non Permanen Lainnya

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Investasi Jangka Panjang Permanen Rp0

C.19 Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 December 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang Permanen

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp0

C.20 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 December 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Investasi Permanen Lainnya Rp0

C.21 Investasi Permanen Lainnya

Saldo Investasi Permanen Lainnya per 31 December 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Investasi Permanen Lainnya adalah sebagai berikut:

Investasi Permanen Lainnya

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Tanah Rp0

C.22 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan 2020 sebesar Rp0. atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun penilaian kembali nilai tanah pada TA 2021. Aset berupa Tanah tersebut terletak di Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang.

Saldo per 31 December 2020	Rp	-
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	-
Mutasi kurang:		
- Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Saldo per 31 December 2021	Rp	-

Rincian Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Tanah per 31 December 2021

No.	KIB	Luas	Nilai	
1	-	-	Rp	-
2			Rp	-
Jumlah			Rp	-

Peralatan dan Mesin Rp10.355.313.160

C.23 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan 2020 adalah Rp10.154.448.160 dan Rp10.355.313.160.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 December 2020	**Rp**	**10.154.448.159,79**
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	73.260.000,00
- Mutasi Masuk dari OPD Lain	Rp	-
- Hibah	Rp	-
- reklasifikasi dari aset lainnya	Rp	168.570.000,00
Mutasi kurang:		
- Kapitaslisasi ke Ekstrakomptabel	Rp	1.265.000,00
- penghapusan	Rp	-
- reklasifikasi ke aset lainnya atau Persediaan	Rp	39.700.000,00
Saldo per 31 December 2021	**Rp**	**10.355.313.159,79**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2021	Rp	(6.790.550.954,68)
Nilai Buku Per 31 December 2021	**Rp**	**3.564.762.205,11**

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

a. Pembelian
b. Penerimaan

Mutasi tambah Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) sesuai berita acara aset tetap berasal dari Belanja Modal pada perolehan aset Tahun Anggaran per 31 December 2021 adalah Rp73.260.000 dan Saldo Aset Tahun Anggaran 2020 dan Rp10.154.448.160 adanya mutasi masuk Kapitalisasi dari Barang dan Jasa berupa Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot-Kantor pada Tahun 2021 dan Rp168.570.000 dapat dilihat pada rincian terlampir.

Mutasi Kurang Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) sesuai berita acara aset tetap berasal dari Belanja Modal pada perolehan aset Tahun Anggaran per 31 December 2021 adalah Rp1.265.000 merupakan kapitalisasi ke ekstrakomptabel dan mutasi keluar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp39.700.000 reklasifikasi dari Akun Aset Tetap 1.3.02.05.02.0005 Alat Dapur yang direklas ke 8.1.02.01.01.0039 Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sesuai dengan surat berita acara sebesar Rp39.700.000 sesuai kebijakan akuntansi.

Gedung dan Bangunan Rp14.678.117.598

C.24 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 December 2021 dan 2020 adalah Rp14.678.117.598 dan Rp14.678.117.598.

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) sesuai berita acara aset tetap berasal dari Belanja Modal pada perolehan aset Tahun Anggaran per 31 December 2021 adalah Rp0 dan Saldo Aset Tahun Anggaran 2020 dan Rp168.570.000.

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) sesuai berita acara aset tetap berasal dari pelimpahan pada aset Tahun Anggaran per 31 December 2021 sesuai dengan Berita Acara Mutasi Masuk Aset nomor: 130/120.B-BPKAD/2020 tertanggal 14-12-2020 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada Tahun 2021 dan Rp0.

Saldo per 31 December 2020	Rp	14.678.117.598,15
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	-
- Limpahan dari OPD lain	Rp	-
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Mutasi kurang:		
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Saldo per 31 December 2021	Rp	14.678.117.598,15
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2021	Rp	(795.274.949,63)
Nilai Buku Per 31 December 2021	Rp	13.882.842.648,52

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp Rp0

C.25 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada tahun 2021 terjadi mutasi tambah sebesar Rp0. Mutasi transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 December 2020	Rp	-
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	-
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Mutasi kurang:		
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Saldo per 31 December 2021	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2021		-
Nilai Buku Per 31 December 2021	Rp	-

Aset Tetap Lainnya Rp26.565.000

C.26 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 December 2021 dan 2020 adalah Rp26.565.000 dan Rp30.565.000.

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2021. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo per 31 December 2020	Rp	30.565.000
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	-
- Koreksi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesn	Rp	-
- Koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Mutasi kurang:		
- Koreksi pencatatan nilai	Rp	4.000.000
Saldo per 31 December 2021	Rp	26.565.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2021		-
Nilai Buku Per 31 December 2021	Rp	26.565.000

Mutasi Tambah Rincian Aset Tetap Lainnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa kode rekening Belanja Barang Non Kapitalisasi Tahun Anggaran per 31 December 2021 adalah Rp0 berupa peralatan mesin yang sedianya akan dihapuskan, mutasi masuk sebesar Rp0 Berita Acara Aset Tetap Lainnya pada Saldo Aset Tahun Anggaran 2021 dan Rp26.565.000.

Mutasi Kurang Rincian Aset Tetap Lainnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran per 31 December 2021 adalah Rp0 berupa akun rekening 1.3.05.01.01.0001 Buku Umum direklas ke akun peralatan dan mesin akun 1.3.02.19.01.0003 Peralatan Senam senilai, Rp4.000.000 .

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp0

C.27 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. .

Saldo per 31 December 2020	Rp	-
Mutasi tambah:		
- Rehab Berat Ruang Kelas	Rp	-
Mutas kurang:		
- Gedung yang sudah selesai		
Saldo per 31 December 2021	Rp	-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Rp7.585.825.904

C.28 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar -Rp7.585.825.904 dan -Rp5.323.943.548.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 December 2021 disajikan pada rincian dibawah ini, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 December 2021

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan 2021	Akm. Penyusutan 2020
1	Peralatan dan Mesin	10.355.313.159,79	(6.790.550.954,68)	(5.262.784.724,59)
2	Gedung dan Bangunan	14.678.117.598,15	(795.274.949,63)	(61.158.823,33)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	26.565.000,00	-	-
Akumulasi Penyusutan		**25.059.995.757,94**	**(7.585.825.904,31)**	**(5.323.943.547,92)**

Aset Tak Berwujud Rp436.107.000

C.29 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud berupa Software Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan 2020 adalah Rp166.802.333 dan Rp322.785.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, aset tak berwujud ini merupakan koreksi dari akun belanja barang dan jasa ke akun aset tak berwujud.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 December 2020	Rp	322.785.000
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	49.000.000
- Reklasifikasi	Rp	64.322.000
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Mutasi kurang:		
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Saldo per 31 December 2021	Rp	436.107.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2021	Rp	(269.304.667)
Nilai Buku Per 31 December 2021	Rp	166.802.333

Rincian Aset Tak Berwujud Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud per 31 December 2021

No.	Uraian	Nilai	
1	Software Aplikasi Penyusunan Data dan Informasi Gender	Rp	44.165.000
2	Software Aplikasi Penyusunan Sistem Data dan Informasi KB	Rp	85.795.000
3	Softawe Aplikasi Penyusunan Sistem Data dan Informasi Anak	Rp	49.500.000
4	Softawe Aplikasi Pembangunan Sistem Informasi menangani Adua dan Kekerasan	Rp	149.822.000
5	SIJELITA	Rp	57.825.000
6	ANDALAN	Rp	49.000.000
7	Penyusutan	Rp	(269.304.667)
Jumlah		**Rp**	**166.802.333**

Mutasi tambah Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) sesuai berita acara aset tetap berasal dari Belanja Modal pada perolehan aset Tahun Anggaran per 31 December 2021 adalah Rp436.107.000 dan Saldo Aset Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp322.785.000 pada Tahun 2021 adanya Pembelian Software sebesar Rp49.000.000 dan mutasi masuk Kapitalisasi dari Barang dan Jasa berupa Akun Beban Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp64.322.000 dapat dilihat pada rincian terlampir.

Aset Lain-Lain Rp0

C.30 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lain-lain merupakan barang milik daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) serta dalam proses penghapusan dari BMD.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 December 2020	Rp	-
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMD yang dihentikan	Rp	-
- penghapusan BMD	Rp	-
Saldo per 31 December 2021	Rp	-
Akumulasi Penyusutan		
Nilai Buku per 31 December 2021	Rp	-

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat disajikan sebagai berikut:

- Penambahan Aset Lain-lain merupakan aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin yang akan di hapuskan sesuai dengan Berita Acara Penghapusan per 31 December 2021 adalah Rp0.

- Penghapusan Aset Lain-lain berupa aset tetap peralatan dan mesin sesuai dengan Berita Acara Penghapusan per 31 December 2021 adalah Rp0.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya - Rp269.304.667

C.31 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 adalah -Rp269.304.667.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 December 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 December 2021

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	Rp 436.107.000	Rp (269.304.667)	Rp 166.802.333
Aset Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 436.107.000	Rp (269.304.667)	Rp 166.802.333

Utang Perhitungan Pihak Ketiga Rp0

C.32 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 December 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 December 2021

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp -	Rp -
2		Rp -	Rp -
3		Rp -	Rp -
Total		Rp -	Rp -

Utang Bunga Rp0

C.33 Utang Bunga

Nilai Utang Bunga per 31 December 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp23.283.091 dan Adapun rincian Utang Bunga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Bunga per 31 December 2021

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		Rp -	

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp0

C.34 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 December 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Kekurangan pembayaran gaji berkala 2 orang pegawai.

Adapun rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 December 2021

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		Rp -	

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.35 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan 2020 sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 December 2021

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		Rp -	

Utang Beban Rp0

C.36 Utang Beban

Saldo Utang Beban pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan 2020 sebesar Rp23.283.091 merupakan utang Beban Tagihan Listrik dan Rp0. Rincian Utang Beban disajikan sebagai berikut:

Rincian Utang Beban per 31 December 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Utang Beban	Rp 23.283.091	Rp -
2		Rp -	Rp -
3		Rp -	Rp -
Total		Rp 23.283.091	Rp -

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.37 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan 2020 sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai berikut:

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 December 2021

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Utang Belanja	Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		Rp -	

Utang Dalam Negeri Rp0

C.38 Utang Dalam Negeri

Saldo Utang Dalam Negeri pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan 2020 sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Dalam Negeri sebagai berikut:

Rincian Utang Dalam Negeri per 31 December 2021

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		Rp -	

Utang Jangka Panjang Lainnya Rp0

C.39 Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan 2020 sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut:

Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 December 2021

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		**Rp -**	

Ekuitas Rp17.693.708.616

C.40 Ekuitas

Ekuitas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan 2020 sebesar Rp17.693.708.616,40 dan Rp19.755.552.664,66.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Rincian Ekuitas per 31 December 2021

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Ekuitas Awal	Rp 19.755.552.664,66	Rp -
2	Koreksi Ekuitas	Rp (2.260.123.568,70)	Rp 19.711.257.764,66
3	Aset Lancar	Rp 76.019.520,44	Rp 11.754.900,00
4	Belanja Modal	Rp 122.260.000,00	Rp 32.540.000,00
Total Ekuitas		**Rp 17.693.708.616,40**	**Rp 19.755.552.664,66**

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional - LO Rp0

D.1 Pendapatan Operasional - LO

Jumlah Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Operasional - LO Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -	0,00
Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah	**Rp -**	**Rp -**	**0,00**

Pendapatan Operasional pada Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat pendapat hibah.

Beban Pegawai Rp14.986.980.587

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp14.986.980.587 dan Rp12.546.150.794 sehingga terjadi kenaikan sebesar 16,29 persen.

Terjadinya kenaikan Beban Pegawai hal ini walaupun ada kebijakan pemerintah dalam tahun ini dimana pengaruh bencana luar biasa yaitu Covid-19 dimana pegawai bekerja tidak seperti biasa yaitu adanya pembagian tugas Piket dan WFH (Work From Home) sehingga pembayaran Beban Tunjangan Kinerja dilakukan hanya sebesar 50% dan 75%.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	Tahun 2021		Tahun 2020		Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	Rp	3.174.601.168	Rp	3.236.445.600	-1,95
Beban Tunjangan Keluarga PNS	Rp	274.260.120	Rp	274.859.932	-0,22
Beban Tunjangan Jabatan PNS	Rp	240.260.000	Rp	241.690.000	-0,60
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp	105.015.000	Rp	110.880.000	-5,58
Beban Tunjangan Beras PNS	Rp	168.376.500	Rp	151.502.640	10,02
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp	7.818.527	Rp	6.429.944	17,76
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp	42.199	Rp	45.445	-7,69
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp	334.694.081	Rp	313.582.123	6,31
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp	6.510.194	Rp	26.652.500	-309,40
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp	19.530.823	Rp	-	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp	10.304.786.975	Rp	8.154.662.610	20,87
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp	7.700.000	Rp	14.000.000	-81,82
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp	303.265.000	Rp	15.400.000	94,92
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp	12.120.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp	28.000.000	Rp	-	100,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - LO	Rp	-	Rp	-	0,00
Jumlah	**Rp**	**14.986.980.587**	**Rp**	**12.546.150.794**	**16,29**

Beban Persediaan Rp2.923.353.900

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp2.923.353.900 dan Rp975.747.940 mengalami kenaikan sebesar 66,62 persen.

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021		Tahun 2020		Naik (Turun) %
Beban Bahan-Bahan Kimia	Rp	743.600	Rp	116.738.440	-15.599,09
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	Rp	12.275.000	Rp	15.784.500	-28,59
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	914.656.800	Rp	9.900.000	98,92
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	46.688.400	Rp	-	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp	13.100.000	Rp	2.739.000	79,09
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	Rp	67.395.500	Rp	22.500.000	66,61
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp	172.000.300	Rp	-	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp	11.188.200	Rp	-	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	Rp	3.500.000	Rp	92.100.000	-2.531,43
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp	347.162.000	Rp	13.080.000	96,23
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp	3.914.000	Rp	-	100,00
Beban Obat-Obatan-Obat	Rp	12.000.000	Rp	285.600.000	-2.280,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp	5.998.000	Rp	417.306.000	-6.857,42
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp	1.185.459.000	Rp	-	100,00
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	Rp	675.000	Rp	-	100,00
Beban Natura dan Pakan-Natura	Rp	111.748.100	Rp	-	100,00
Beban Natura dan Pakan-Pakan	Rp	14.850.000	Rp	-	100,00
Jumlah Beban Persediaan	**Rp**	**2.923.353.900**	**Rp**	**975.747.940**	**66,62**

Beban Jasa Rp5.702.406.091

D.4 Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp5.702.406.091 dan Rp4.798.026.887 mengalami kenaikan sebesar 15,86 persen.

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Tahun 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021		Tahun 2020		Naik (Turun) %
Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp	406.650.000	Rp	101.952.000	74,93
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp	82.205.000	Rp	202.670.000	-146,54
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp	83.328.000	Rp	65.950.000	20,85
Beban Pakaian Batik Tradisional	Rp	8.125.000	Rp	56.750.000	-598,46
Beban Pakaian Olahraga	Rp	29.700.000	Rp	25.200.000	15,15
Beban Honorarium Narasumber atau	Rp	1.791.050.000	Rp	2.103.650.000	-17,45
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli,	Rp	145.000.000	Rp	-	100,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal,	Rp	55.000.000	Rp	91.463.261	-66,30
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	Rp	90.900.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	Rp	22.000.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Rp	19.000.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	Rp	582.900.000	Rp	1.220.799.000	-109,44
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp	10.000.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	Rp	515.744.000	Rp	319.950.000	37,96
Beban Jasa Tenaga Keamanan	Rp	218.400.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	Rp	87.750.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp	8.000.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp	65.879.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan	Rp	528.450.000	Rp	-	100,00
Beban Tagihan Telepon	Rp	8.605.738	Rp	-	100,00
Beban Tagihan Listrik	Rp	23.283.091	Rp	-	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat	Rp	42.350.000	Rp	-	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp	25.741.296	Rp	20.379.326	20,83
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi	Rp	2.079.286	Rp	3.377.700	-62,45
Beban Sewa Mebel	Rp	8.865.000	Rp	70.847.000	-699,18
Beban Sewa Alat Pendingin	Rp	6.000.000	Rp	47.400.000	-690,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	Rp	14.000.000	Rp	-	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	Rp	12.817.680	Rp	196.000	98,47
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat	Rp	176.500.000	Rp	195.767.600	-10,92
Beban Sewa Taman	Rp	13.250.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	Rp	178.227.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	Rp	155.958.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	Rp	63.000.000	Rp	83.000.000	-31,75
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp	93.210.000	Rp	188.675.000	-102,42
Beban Jasa Konsultansi Bidang	Rp	11.438.000	Rp	-	100,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp	117.000.000	Rp	-	100,00
Jumlah	**Rp**	**5.702.406.091**	**Rp**	**4.798.026.887**	**15,86**

Beban Pemeliharaan Rp428.750.569

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp428.750.569 dan Rp312.248.267 mengalami kenaikan sebesar 15,86 persen.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021		Tahun 2020		Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	Rp	325.009.569	Rp	286.086.075	11,98
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-	Rp	55.132.000	Rp	-	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rp	-	Rp	16.920.000	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer	Rp	48.609.000	Rp	9.242.192	80,99
Beban Pemeliharaan Barang Non Kapitalisasi Peralatan Kantor	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Pemeliharaan Barang Non Kapitalisasi Konstruksi/Bangunan	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Pemeliharaan Barang Non Kapitalisasi	Rp	-	Rp	-	0,00
Jumlah	**Rp**	**428.750.569**	**Rp**	**312.248.267**	**27,17**

Beban Perjalanan Dinas Rp1.166.319.200

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.166.319.200 dan Rp464.365.538 mengalami kenaikan sebesar 60,19 persen.

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021		Tahun 2020		Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Rp	108.987.700	Rp	183.618.408	-68,48
Beban Perjalanan Dinas Tetap	Rp	921.435.500	Rp	-	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	Rp	131.816.000	Rp	269.647.130	-104,56
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	4.080.000	Rp	11.100.000	-172,06
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	Rp	-	Rp	-	0,00
Jumlah	**Rp**	**1.166.319.200**	**Rp**	**464.365.538**	**60,19**

Beban Bunga Rp0

D.7 Beban Bunga

Beban Bunga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bunga Tahun 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun) %
	Rp -	Rp -	0,00
	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah	**Rp -**	**Rp -**	**0,00**

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.10 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	Rp -	Rp -	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan	Rp -	Rp -	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah	**Rp -**	**Rp -**	**0,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp2.423.878.293

D.11 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp2.423.878.293 dan Rp1.333.049.372 mengalami penurunan pada Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar 27,30 persen, mengalami kenaikan pada Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar 88,78 persen dan mengalami penurunan pada Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar 2,73 persen .

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020 dapat dirinci sebagai berikut

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 1.600.001.015	Rp 1.163.169.999	27,30
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 733.905.880	Rp 82.364.416	88,78
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	Rp -	Rp -	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah Penyusutan	**Rp 2.333.906.895**	**Rp 1.245.534.415**	**46,63**
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp 89.971.398	Rp 87.514.957	2,73
Beban Penyusutan aset lain-lain	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah Amortisasi	**Rp 89.971.398**	**Rp 87.514.957**	**2,73**
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**Rp 2.423.878.293**	**Rp 1.333.049.372**	**45,00**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.13 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	Rp -	Rp -	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah	**Rp -**	**Rp -**	**0,00**

Beban Lain-lain Rp0

D.16 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Penyisihan Piutang atas Beban Lain-lain untuk Tahun 2021 dan 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

Rincian Beban Lain-lain Tahun 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun) %
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -	0,00
Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	0,00
Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah Penyusutan	**Rp -**	**Rp -**	**0,00**

Kegaiatan Non Operasional Rp0

D.17 Kegaiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dna fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegaiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka	Rp -	Rp -	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegaitan Non Operasional	**Rp -**	**Rp -**	**0,00**

Pos Luar Biasa Rp0

D.18 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -	0,00
Beban Luar Biasa	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah	**Rp -**	**Rp -**	**0,00**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp19.755.552.665

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp19.755.552.665 dan Rp4.192.737.499 mengalami kenaikan sebesar 371,19 persen.

Surplus (Defisit) LO -Rp27.631.688.640

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) periode yang berakhir pada 31 December 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar -Rp27.631.688.640 dan -Rp21.020.338.798 mengalami penurunan sebesar 31,45 persen.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.5 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	Rp -
Suku Cadang	Rp -
Barang Persediaan Lainnya	Rp -
Jumlah	**Rp -**

Koreksi Aset Tetap Rp0

E.9 Koreksi Aset Tetap

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2021 sebesar -Rp9.600.716 .

Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Mutasi Aset Tetap Masuk sebesar Rp0 dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Baggage Trolly di Reklasifikas ke Aset Ekstrakompatable sebesar Rp9.600.716 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB).

Rincian Koreksi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Koreksi
Mutasi Aset Tetap Masuk	Rp -
Mutasi Aset Tetap Keluar	Rp 9.600.716
Jumlah	**Rp (9.600.716)**

Koreksi Aset Lainnya Rp0

E.11 Koreksi Aset Lainnya

Koreksi Atas Aset Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan Aset Lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Aset Lainnya untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	Rp -
Beban Jasa	Rp -
Jumlah	**Rp -**

Ekuitas Akhir Rp17.693.708.616

E.13 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) pada tanggal 31 December 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp17.693.708.616 dan Rp19.755.552.665 mengalami penurunan sebesar -10,44 persen.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Kejadian penting pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) setelah tanggal Neraca tidak ada permasalahan yang mendasar pada saat penyusunan laporan akhir tahun ini.

F.2 INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

Untuk informasi tambahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) dapat digambarkan perbandingan perolehan anggaran maupun realisasi tahun 2020 dengan tahun 2019 sebagai informasi bahwa OPD ini baru terbentuk tahun 2017.

b. Perlu kami informasikan bahwa pada akhir tahun 2020 terjadi perpindahan gedung kantor tempat kerja tadinya di gedung terpadu pindah ke gedung baru Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB).

c. Dalam menatausahakan tata kelola keuangan adanya penurunan dalam hal realisasi anggaran per 31 December 2020, hal ini diakibatkan kondisi pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan.

   Sebagai dasar dari keterkaitannya dengan hal realisasi anggara kami lampirkan Surat Keputusan Gubernur nomor; 443/Kep.114-Huk/2020 Tentang Penetapan KLB Covid-19.

d. Bahwa dalam menatausahakan tata kelola keuangan terhadap rekapitulasi register per 31 December Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) melalui pencatatan yang dilakukan Satuan PPK dan Satuan Bendahara Pengeluaran telah menerbitkan berbagai Berkas dokumen SPP dan SPM/SP2D sebesar Rp28.836.965.308 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Nilai SP2D
- SPP/SPM/SP2D UP sebesar	500.000.000
- SPP/SPM/SP2D TU sebesar	2.753.621.400
- SPP/SPM/SP2D GU sebesar	4.775.875.961
- SPP/SPM/SP2D LS sebesar	17.796.890.015
- SPP/SPM/SP2D Nihil sebesar	3.010.577.932
Total Nilai SP2D	**28.836.965.308**
Jumlah Nilai Belanja SP2D	**25.583.343.908**
Pengembalian Belanja	**23.100.032**
Total Nilai Belanja Sesuai LRA	**25.560.243.876**
- SPP/SPM/SP2D UP sebesar	500.000.000
- SPP/SPM/SP2D TU sebesar	2.753.621.400
Jumlah SP2D UP + TU	**3.253.621.400**
- SPP/SPM/SP2D Nihil sebesar	3.010.577.932
SP2D UP + TU - NIHIL	**243.043.468**
STS TU	**231.483.400**
STS UP	**11.560.068**
Jumlah STS	**243.043.468**
NILAI KAS JUMLAH SP2D UP + TU - NIHIL - STS	**-**

Dapat kami jelaskan Total Realisasi Belanja baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung di rinci pada tabel berikut ini ;

LAPORAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.289.920.000,00	3.174.601.168,00	96,49
2	Belanja Tunjangan Keluarga	331.100.000,00	274.260.120,00	82,83
3	Belanja Tunjangan Jabatan	247.100.000,00	240.260.000,00	97,23
4	Belanja Tunjangan Umum	118.370.000,00	105.015.000,00	88,72
5	Belanja Tunjangan Beras	203.789.880,00	168.376.500,00	82,62
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.000.000,00	7.818.527,00	37,23
7	Belanja Pembulatan Gaji	103.322,00	42.199,00	40,84
8	Belanja Iuran BPJS Kesehatan	385.920.000,00	334.694.081,00	86,73
9	Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	14.762.210,00	6.510.194,00	44,10
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	10.783.650.000,00	10.304.786.975,00	95,56
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	9.600.000,00	7.700.000,00	0,00
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	401.280.000,00	343.385.000,00	85,57
	Jumlah	**15.806.595.412,00**	**14.967.449.764,00**	**94,69**

LAPORAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**18.656.236.000**	**17.700.489.051**	**94,88**
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	249.041.000	222.095.500	89,18
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.924.000.000	15.061.980.587	94,59
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.339.000	30.844.000	98,42
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	986.700.750	980.734.075	99,40
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.414.000	28.558.000	97,09
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.006.304.000	947.526.320	94,16
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.437.250	428.750.569	99,84
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	**2.109.555.000**	**1.941.229.000**	**92,02**
8	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	156.803.000	139.355.000	88,87
9	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1.284.752.000	1.171.814.000	91,21
10	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	668.000.000	630.060.000	94,32
	Program Perlindungan Perempuan	**955.707.000**	**905.953.000**	**94,79**
11	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	514.032.500	488.132.500	94,96
12	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	242.928.500	230.074.500	94,71
13	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layananan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	198.746.000	187.746.000	94,47
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	**2.410.310.000**	**2.119.914.600**	**87,95**
14	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	821.352.000	780.647.500	95,04
15	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1.588.958.000	1.339.267.100	84,29
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	**576.984.000**	**518.828.000**	**89,92**
16	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	576.984.000	518.828.000	89,92
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**329.049.500**	**218.675.000**	**66,46**
17	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	227.799.500	126.875.000	55,70
18	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	101.250.000	91.800.000	90,67
	Program Perlindungan Khusus Anak	**477.461.500**	**434.240.300**	**90,95**
19	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	73.833.000	67.034.000	90,79

20	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	203.856.500	189.296.300	92,86
21	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	199.772.000	177.910.000	89,06
	Program Pendaftaran Penduduk	**497.886.775**	**281.113.500**	**56,46**
22	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	87.124.000	67.583.000	77,57
23	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	356.596.775	178.174.500	49,97
24	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	54.166.000	35.356.000	65,27
	Program Pencatatan Sipil	**438.984.000**	**238.145.500**	**54,25**
25	Pelayanan Pencatatan Sipil	63.984.000	40.678.000	63,58
26	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	237.082.000	109.096.000	46,02
27	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	137.918.000	88.371.500	64,08
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**491.577.000**	**453.110.800**	**92,17**
28	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	404.784.000	381.583.800	94,27
29	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	86.793.000	71.527.000	82,41
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	**207.345.000**	**196.670.125**	**94,85**
30	Penyediaan Profil Kependudukan	207.345.000	196.670.125	94,85
	Program Pengendalian Penduduk	**306.200.000**	**289.736.000**	**94,62**
31	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	124.109.000	116.789.000	94,10
32	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	182.091.000	172.947.000	94,98
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**139.008.000**	**124.753.000**	**89,75**
33	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	74.373.000	66.868.000	89,91
34	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	64.635.000	57.885.000	89,56
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**209.600.000**	**137.386.000**	**65,55**
35	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	88.000.000	49.594.000	56,36
36	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	121.600.000	87.792.000	72,20
	Jumlah	**27.805.903.775**	**25.560.243.876**	**91,92**

c. Penertiban Pegawai antara lain :

Dapat diinformasikan bahwa pegawai sebanyak 66 (enam puluh enam) orang ASN dari mutasi masuk 9 (sembilan) pegawai, 9 (sembilan) ASN yang mutasi keluar, pegawai pensiun 1 (satu) dan 1 (satu) ASN meninggal dunia sehingga ASN Tahun 2020 sebanyak 66 (enam puluh enam) pegawai dan Tenaga Honorer/P3K sebanyak 29. Data ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) sampai dengan akhir Tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

d. Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, pada Tahun 2021 terbentuk UPT DP3AKKB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Salah satu tugas DP3AKKB berdasarkan :

1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.312-Huk/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut :

   1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/atasan langsung bendahara, dan berwenang menandatangi SPM dan mengesahkan SPJ adalah :

      Nama : **Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si**
      NIP : 19681012 198803 2 003
      Jabatan : Kepala DP3AKKB Provinsi Banten

   2) Bendahara Pengeluaran
      Nama : **Siti Fatimah, Sos**
      NIP : 19761107 200112 2 003
      Jabatan : Bendahara Pengeluaran DP3AKKB Provinsi Banten

2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 034.05/Kep.355-Huk/2019 tentang Penetapan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang Pembantu Unit Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019 antara lain sebagai berikut:

   1) Pejabat Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang DP3AKKB
      Nama : **Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si**
      NIP : 19681012 198803 2 003

   2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang DP3AKKB
      Nama : **Inova Handayani, S.STP**
      NIP : 19821022 200112 2 002

   3) Pengurus Barang Pengguna DP3AKKB
      Nama : **Yuliyanti, S.Ag.M.Si**
      NIP : 19760702 200112 2 001

4. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Nomor 902/006-DP3AKKB/2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang /Jasa di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut :

   1) Nama : **Nurhayati, SE**
      NIP : 19761019 200701 2 008

   2] Nama : **Yogi Sudirman**
      NIP : 19790714 201409 1 001

5. Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 045.05/Kep.40-Huk/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Pengelola Arsip pada Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut :

   1] Nama : **Panca Mega Putra**
      NIP : 19670601 201401 1 001

   1] Nama : **Reyza Moena Anggrayni, S.STP**
      NIP : 19921006 201406 2 001

6. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Nomor 900/088.2-DP3AKKB/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penetapan Pembantu Pengurus Barang Milik Pemerintah Provinsi Banten di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut :

   1] Nama : **Rini Mulyani, SE**
      NIP : 19800924 200112 2 004

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKKB)

Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang
Serang

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 03 January 2021

Kepala,

Dra. Hj. SITTI MA'ANI NINA, M.Si
NIP. 19681012 198803 2 003